

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERBANDINGAN ANTARA DAERAH INDUK DAN DAERAH PEMEKARAN

Rohmad Yulianto Catur Wibowo
Universitas Ahmad Dahlan
e-mail: rohmadyulianto@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research tested the difference of financial performance between parent areas and new autonomy areas. The financial performances that meant in this research were degree of decentralization, level of independence, capital expenditure ratio, and level of financing capability. The aim of this research was to analyze the difference of financial performance between parent area and new autonomy area. The objects in this research were districts or cities that become parent areas and districts or cities that become new autonomy areas. The division period that used in this research was in the year of 1999 – 2004. Samples that used in this research were consists of 48 parent areas and 49 new autonomy areas. Data that used in this research is local government revenues and expenditures budget realization report in the period of 2005 – 2007. Data analysis performed using independent sample t test from SPSS for window program. Level of significance that used in this research was 5%. Result of this research showing that a) parent areas degree of decentralization significantly better than new autonomy areas, b) parent areas level of independence significantly better than new autonomy areas, c) no significant difference of financing capability level both parent areas and new autonomy areas and d) new autonomy areas capital expenditure ratio significantly better than parent areas.

Key words: parent areas, new autonomy areas, regional financial performance, degree of decentralization, level of independence, financing capability level, capital expenditure ratio.

PENDAHULUAN

Pada era sebelum tahun 1998 kekuasaan yang ada di Indonesia sangat sentralistik. Kekuasaan sangat berpusat di Jakarta (ibu kota negara) dan daerah-daerah di Indonesia sangat tergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah memandang adanya ketidakadilan karena pendapatan dari pengolahan sumber daya alam yang ada di daerah disedot ke pusat sehingga daerah yang menjadi pemilik sumber daya alam

hanya mendapat porsi atau bagian yang sedikit sedangkan pusat pemerintahan mendapatkan bagian yang lebih banyak, sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antara pusat dengan daerah, kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah, dan tingkat kesejahteraan daerah yang belum mencukupi.

Pada era pemerintahan Habibie untuk mengakomodir keinginan daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, sehingga muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

(telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 (telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Penerbitan undang - undang tersebut mengakibatkan munculnya banyak daerah pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB). Keinginan suatu daerah untuk melakukan pemekaran disebabkan oleh beberapa alasan. Adanya kesenjangan ekonomi dan belum meratanya pembangunan ekonomi di daerah menjadi alasan daerah tersebut untuk melakukan pemekaran wilayah. Tuntutan pemekaran wilayah muncul karena anggapan bahwa daerah yang terlalu luas maka akan ada ketidakmerataan distribusi ekonomi dan pembangunan, karena biasanya pembangunan hanya ada di sekitar kota saja.

Banyak pihak juga yang juga mempertanyakan apakah pemekaran wilayah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataukah justru segelintir pihak yang mengambil keuntungan baik secara ekonomi maupun secara politik terhadap pemekaran daerah. Untuk bisa menjawab hal itu maka perlu ada studi mengenai pemekaran daerah. Pemekaran daerah sesungguhnya juga menjadi tantangan bagi kinerja keuangan daerah induk, karena pemekaran daerah memunculkan potensi berkurangnya pendapatan asli daerah induk, karena sumber daya alam yang semula menjadi wilayahnya akan menjadi hak daerah baru, demikian juga pendapatan dari pajak dan retribusi juga akan berkurang karena adanya sebagian warga yang beralih menjadi warga dari propinsi atau kabupaten baru.

Hasil studi yang dilakukan oleh Bappenas (2008) terhadap 10 daerah induk dan 10 daerah pemekaran menunjukkan bahwa ada perbedaan kinerja keuangan daerah antara daerah induk dibandingkan dengan daerah pemekaran. Kinerja keuangan yang diamati dalam penelitian ini adalah tingkat ketergantungan fiskal dan rasio belanja modal terhadap total belanja. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal pemerintah daerah pemekaran lebih tinggi dari pada daerah induk, akan tetapi rasio belanja modal terhadap total belanja di daerah induk justru lebih kecil dibandingkan daerah pemekaran. Bappenas menyatakan bahwa sampai saat ini masih sedikit studi yang mengkaji tentang kinerja dari pemerintah daerah pemekaran.

Kinerja keuangan daerah baik daerah induk maupun daerah otonomi baru atau daerah pemekaran menarik untuk diamati karena dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sendiri keuangannya dan juga diberikan kewenangan untuk menggali sumber PAD.

Berdasarkan telaah kinerja keuangan pemerintah daerah (pemda) antara daerah induk dan daerah otonomi (pemekaran) tersebut penelitian ini dilakukan untuk menganalisis (1) perbedaan tingkat desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian pemda antara daerah induk dengan daerah pemekaran otonomi, (2) perbedaan rasio belanja modal antara pemda induk dengan daerah otonomi, (3) perbedaan tingkat kemampuan pembiayaan pemda antara daerah induk dengan daerah otonomi.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak setelah era reformasi sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai ketentuan mengenai pembentukan daerah dan kawasan khusus.

Menurut UU 32 2004 (dalam Argama, 2005) Pembentukan daerah baru harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya :

- a. Persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan.

- b. Persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur.
- c. Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya

- a. Persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan.
- b. Persetujuan DPRD provinsi dan gubernur.
- c. Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri

PP 129/2000 menyatakan bahwa tujuan dari pemekaran wilayah adalah mensejahterakan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban.
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Hal penting yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ialah bagaimana pemerintah daerah melakukannya. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraannya maka kita perlu melakukan evaluasi terhadap keuangan pemerintah daerah. Tanpa adanya keuangan pemerintah daerah yang memadai maka tidak mungkin semua tujuan pemekaran bisa tercapai (Bapponas 2008). Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota (www.wikipedia.or.id).

Analisis Kinerja Keuangan APBD

Keuangan pemerintah yang tercantum dalam APBD merupakan gambaran kegiatan atau kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Salah satu cara penilaian kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisa laporan keuangan pemerintah daerah dengan melakukan analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2007). Interpretasi hasil perhitungan rasio keuangan bisa digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kita bisa melakukan perbandingan kinerja keuangan antara satu periode dengan periode sebelumnya atau antara satu daerah dengan daerah lain untuk melihat perbedaannya. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan yaitu: tingkat desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian daerah, rasio belanja modal dan tingkat kemampuan pembiayaan.

Tingkat Desentralisasi Fiskal

Elmi (2002) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Halim dan Mujib (2009) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal pada dasarnya merupakan sebuah mekanisme pendanaan terhadap pemerintahan sehari-hari yang bersumber dari APBN berkaitan dengan kebijakan keuangan negara dalam mewujudkan ketahanan fiskal (*fiscal sustainability*) dan diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap kegiatan perekonomian masyarakat.

Tingkat Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian daerah menunjukkan kemampuan daerah membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat maupun propinsi. Kemandirian daerah pada dasarnya menggambarkan partisipasi masyarakat daerah sebagai pembayar pajak daerah dan retribusi daerah. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah. Tingkat kemandirian daerah juga menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber-sumber pendapatan eksternal diluar pendapatan asli daerah (Halim, 2008). Kemandirian daerah menjadi mutlak ketika sistem pemerintahan berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi fiskal. Dengan adanya perubahan sistem maka daerah harus mandiri dalam merencanakan maupun dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah.

Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal terhadap total belanja menunjukkan besarnya proporsi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja modal adalah belanja aset tetap dan aset lainnya yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran atau satu periode akuntansi (Halim, 2008). Porsi belanja modal pada dasarnya menunjukkan keterpilihakan pemerintah daerah pada masyarakat. Belanja modal menunjukkan besarnya belanja sarana dan prasarana untuk rakyat.

Tingkat Kemampuan Pembiayaan

Tingkat kemampuan pembiayaan daerah yaitu untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam membiayai pengeluaran rutin. Indikator tingkat kemampuan pembiayaan suatu daerah diukur dengan rasio PAD terhadap pengeluaran rutin (PR), (Halim, 2001 dalam Firmansyah 2007). Belanja rutin atau pengeluaran rutin adalah pengeluaran

yang manfaatnya hanya untuk satu tahun periode anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan pemerintah (Halim, 2008). Pada dasarnya pengeluaran rutin merupakan perwujudan dari pemaknaan dana-dana untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah di samping kegiatan-kegiatan yang bersifat administrasi.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Kinerja daerah pemekaran perlu dievaluasi untuk melihat kemajuannya. Evaluasi bisa dilakukan dengan membandingkan antara daerah sebelum dan sesudah pemekaran atau dengan membandingkan antara daerah pemekaran dengan daerah induk. Bappenas menyatakan bahwa belum begitu banyak penelitian tentang evaluasi kinerja pemerintah daerah otonomi baru atau daerah pemekaran. Salah satu evaluasi kinerja yang dilakukan adalah dengan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melakukan analisis terhadap rasio laporan keuangan pemerintah daerah.

Bappenas (2008) melakukan kajian terhadap 5 daerah otonomi baru (DOB). Hasil kajian tersebut menyatakan bahwa daerah otonomi baru masih sangat tergantung pada transfer pusat.

Bappenas (2008) melakukan penelitian terhadap kinerja 10 daerah induk dan 10 daerah pemekaran. Rasio keuangan yang digunakan adalah tingkat ketergantungan fiskal dan rasio belanja modal. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ketergantungan fiskal daerah pemekaran lebih besar daripada daerah induk.

Adonistama (2009) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah pemekaran Banyuwangi lebih rendah dibandingkan daerah induknya. Hasil riset ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Banyuwangi lebih tinggi daripada daerah induk. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan PAD.

Maclindra (2009) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan setelah dilakukan pemekaran. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah induk dari Kota Tasikmalaya, setelah diadakan pemekaran wilayah Kabupaten Tasikmalaya kehilangan pendapatan asli daerah yang cukup signifikan, hal ini disebabkan sumber pendapatan asli daerah yang potensial menjadi milik daerah pemekaran atau daerah otonomi baru.

Ada rasio keuangan yang berbeda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: tingkat desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian daerah. Alasan pemilihan rasio tersebut karena karena pada saat otonomi daerah menurut Halim (2001) salah satu ciri suatu daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu:

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, atau kita bisa mengatakan bahwa daerah harus mandiri dalam menjalankan pemerintahannya. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

- H1: Terdapat perbedaan tingkat desentralisasi fiskal pemerintah daerah antara daerah induk dengan daerah pemekaran
- H2: Terdapat perbedaan tingkat kemandirian pemerintah daerah antara daerah induk dengan daerah pemekaran.

Salah satu tujuan dari pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pembangunan di daerah. Belanja pembangunan pemerintah daerah tercermin pada belanja modal dalam APBD.

Penelitian yang dilakukan Bappenas (2008) menyatakan bahwa rasio belanja modal daerah pemekaran lebih tinggi dibandingkan daerah induk. Adhoniwina (2009) menyatakan bahwa rasio belanja modal daerah pemekaran Banyuwangi lebih tinggi dibandingkan daerah induknya. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

- H3: Terdapat perbedaan rasio belanja modal antara pemerintah daerah induk dengan daerah pemekaran.

Ciri yang lain suatu daerah dapat melaksanakan otonomi yaitu daerah mempunyai kemampuan keuangan daerah, yang berarti bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri untuk membiayai pemerintahannya. Salah satu rasio keuangan untuk melihat kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai pemerintahannya adalah rasio kemampuan pembiayaan. Dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

- H4: Terdapat perbedaan tingkat kemampuan pembiayaan pemerintah daerah antara daerah induk dengan daerah pemekaran

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemerintah kabupaten atau kota yang mengalami pemekaran wilayah (daerah induk) dan pemerintah kabupaten atau kota yang dimekarkan antara tahun 1999 - 2004 dan telah mempublikasikan laporan APBD secara lengkap selama tahun 2005-2007. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 48 daerah induk dan 49 daerah pemekaran.

Sumber dan Teknik Pengambilan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari situs internet www.bpk.go.id. Data tersebut merupakan data realisasi APBD pemerintah daerah induk dan pemekaran dari tahun 2005-2007.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan kemandirian daerah pemerintah kabupaten kota tersusun sebagai berikut:

Tingkat Desentralisasi Fiskal

Tingkat desentralisasi fiskal yaitu untuk mengukur seberapa besar porsi PAD yang diperoleh kabupaten kota dalam memaksimalkan penerimaan daerahnya. Tingkat de-sentralisasi fiskal pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan analisis perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) (Mahmudi, 2007).

Tingkat Kemandirian

Tingkat kemandirian menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pemerintahannya. Tingkat Kemandirian dalam penelitian ini diukur dengan analisis perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Transfer Pusat ditambah transfer propinsi ditambah Pinjaman (Mahmudi, 2007).

Rasio Belanja Modal

Rasio ini menunjukkan seberapa besar belanja investasi untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Rasio belanja dihitung dengan analisis perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Mahmudi, 2007).

Tingkat Kemampuan Pembiayaan

Tingkat kemampuan pembiayaan daerah yaitu untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam membiayai pengeluaran rutin. Kemampuan daerah dalam

membiayai pengeluaran rutin pada penelitian ini diukur dengan analisis perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah pengeluaran rutin (PR) (Halim, 200) dalam Firmansyah, 2007).

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis analisis diatas menggunakan pengujian statistik dengan program SPSS yaitu uji t untuk dua sampel independen (*Independent Sample t Test*). Uji t ini digunakan untuk menguji dua sampel yang independen yaitu sampel daerah induk dibandingkan dengan daerah pemekaran apakah mempunyai rata-rata desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian daerah, tingkat kemampuan pembiayaan dan rasio belanja modal secara nyata atau signifikan berbeda atau tidak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Data

Hasil yang pengolahan dengan alat SPSS memperlihatkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2 tailed)* untuk tingkat desentralisasi, tingkat kemandirian, dan kemampuan pembiayaan dibawah atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal, sehingga alat uji beda yang digunakan adalah statistik non parametrik.

Nilai *Asymp. Sig. (2 tailed)* untuk rasio belanja modal adalah 0,200 sehingga lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data rasio belanja modal terdistribusi secara normal, sehingga alat uji beda yang digunakan adalah statistik parametrik.

Tabel 1
Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov

Rasio	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Tingkat Desentralisasi Daerah	0,000	Tidak normal
Tingkat Kemandirian Daerah	0,000	Tidak normal
Tingkat Kemampuan Pembiayaan	0,000	Tidak normal
Belanja Modal	0,200	Normal

Sumber: hasil olah data

Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Beda Rata-rata Dua Sampel

Uji beda rata-rata dua sampel (*independent sample t test*) digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan masing-masing rasio keuangan antara daerah induk dan daerah pemekaran. Uji beda rata-rata tingkat desentralisasi, tingkat kemandirian, dan tingkat kemampuan pembiayaan antara daerah induk dengan daerah pemekaran diuji dengan menggunakan statistik non parametrik yaitu dengan uji Mann-Whitney. Data tingkat belanja modal terdistribusi normal, oleh karena itu alat uji yang digunakan adalah statistik parametrik yaitu *independent sample t test*.

Berikut disajikan hasil uji beda rata-rata dua sampel dari tingkat desentralisasi, tingkat kemandirian, tingkat kemampuan pembiayaan dan tingkat belanja modal.

Tabel 2
Hasil Uji Beda Rata-rata

Rasio	Signifikansi
PAD/TPD	0,010
PAD/Transfer dan Pinjaman	0,030
PAD/PR	0,315
Belanja Modal Total Belanja	0,020

Sumber: hasil olah data

Tingkat Desentralisasi

Hasil pengujian dengan alat uji statistik non parametrik Mann-Whitney menunjukkan nilai signifikansi (*2-tailed*) tingkat desentralisasi

sebesar 0,010 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, dengan demikian hasil tersebut menerima H1 yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara tingkat desentralisasi daerah induk dengan tingkat desentralisasi daerah pemekaran. Jika dilihat dari nilai *mean* tingkat desentralisasi daerah induk sebesar 0,042(4,2%) dan daerah pemekaran sebesar 0,036 (3,6%). Nilai *mean* tersebut menunjukkan bahwa *mean* tingkat desentralisasi daerah induk lebih besar dari pada nilai *mean* tingkat desentralisasi daerah pemekaran.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Tingkat Desentralisasi

Rasio	Daerah	N	Mean	Maksimum	Minimum
PAD/TPD	Induk	45	0,042*	0,150	0,011
	Pemekaran	49	0,036	0,125	0,006

Sumber: hasil olah data

Tingkat Kemandirian

Hasil pengujian dengan alat uji statistik non parametrik Mann-Whitney menunjukkan nilai signifikansi (*2-tailed*) tingkat kemandirian sebesar 0,030 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, dengan demikian hasil tersebut menerima H2 yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kemandirian daerah induk dengan tingkat kemandirian daerah pemekaran. Jika dilihat dari nilai *mean* tingkat kemandirian daerah induk sebesar 0,052 (5,2%) dan nilai *mean* tingkat kemandirian daerah pemekaran sebesar 0,0500 (5%). Nilai *mean* tersebut menunjukkan bahwa *mean* tingkat kemandirian daerah induk lebih besar daripada nilai *mean* tingkat kemandirian daerah pemekaran.

Tabel 4
Statistik Deskriptif Tingkat Kemandirian

Rasio	Daerah	N	Mean	Maksimum	Minimum
PAD/TPD (Pinjaman)	Induk	48	0,052	0,150	0,013
	Pemekaran	48	0,050	0,258	0,009

Sumber: hasil olah data

Rasio Belanja Modal

Data tingkat belanja modal terdistribusi normal, oleh karena itu aksi uji yang digunakan adalah statistik parametrik yaitu *independent sample t test*. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi (*2-tailed*) tingkat belanja modal sebesar 0,020 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 dengan demikian hasil tersebut menerima H_3 yang berarti ada perbedaan signifikan tingkat belanja modal antara daerah induk dengan daerah pemekaran. Jika dilihat dari nilai *mean* tingkat belanja modal 0,265 (26,5%) dan daerah pemekaran sebesar 0,323 (32,3%). Nilai *mean* tersebut menunjukkan bahwa *mean* tingkat belanja modal daerah pemekaran lebih besar dari pada nilai *mean* belanja modal daerah induk.

Tabel 5
Statistik Deskriptif Rasio Belanja Modal

Rasio	Daerah	N	Mean	Standar Deviasi	Minimum	Maximum
Rasio Belanja Modal	Induk	28	0,2652	0,2188	0,0602	0,5002
	Pemekaran	24	0,3235	0,2427	0,0805	0,5005

Sumber: hasil olah data

Tingkat Kemampuan Pembiayaan

Hasil pengujian dengan alat uji statistik non parametrik Mann-Whitney menunjukkan nilai signifikansi (*2-tailed*) tingkat kemampuan pembiayaan sebesar 0,316 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, dengan demikian hasil tersebut menolak H_4 yang berarti tidak perbedaan yang signifikan antara tingkat kemampuan pembiayaan antara daerah induk dengan tingkat kemampuan pembiayaan daerah pemekaran. Jika dilihat dari nilai *mean* tingkat kemampuan pembiayaan daerah induk sebesar 0,0710 (7,10%) dan daerah pemekaran sebesar 0,0711 (7,11%). Nilai *mean* tersebut menunjukkan bahwa *mean* tingkat kemampuan pembiayaan daerah pemekaran lebih besar dari pada nilai *mean* tingkat kemampuan pembiayaan daerah induk, akan tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan.

Tabel 6
Statistik Deskriptif Tingkat Kemampuan Pembiayaan

Rasio	Daerah	N	Mean	Standar Deviasi	Minimum	Maximum
Rasio Kemampuan Pembiayaan	Induk	28	0,0710	0,0313	0,0100	0,1300
	Pemekaran	24	0,0711	0,0313	0,0100	0,1300

Sumber: hasil olah data

Pembahasan

Tingkat Desentralisasi

Tingkat desentralisasi daerah induk dan daerah pemekaran menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Rata-rata tingkat desentralisasi daerah induk adalah 4,2%, sedangkan tingkat desentralisasi pemekaran adalah 3,6%. Secara rata-rata tingkat desentralisasi daerah induk lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat desentralisasi daerah pemekaran, hal ini sesuai dengan penelitian dari Bappenas (2008) yang menyatakan bahwa secara umum optimalisasi pendapatan asli daerah dari daerah otonomi baru atau daerah pemekaran lebih rendah dibandingkan dengan daerah induk. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan mulai dari sistem, regulasi, kelembagaan maupun sumber daya manusianya. Optimalisasi pendapatan asli daerah yang dilakukan menurut undang-undang no. 33 tahun 2004 tidak boleh mengakibatkan ekonomi biaya tinggi atau menghambat mobilisasi penduduk dan lalu lintas barang dan jasa.

Tingkat Kemandirian

Tingkat kemandirian daerah induk dan daerah pemekaran menunjukkan perbedaan yang signifikan. Rata-rata tingkat kemandirian daerah induk adalah 5,2%, sedangkan rata-rata tingkat kemandirian daerah pemekaran adalah 5%. Tingkat kemandirian daerah induk secara rata-rata lebih besar dibandingkan dengan daerah induk. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Bappenas yang menyatakan bahwa ketergantungan fiskal daerah pemekaran lebih tinggi dibandingkan daerah induk. Hasil ini menunjukkan bahwa daerah pemekaran memiliki ketergantungan yang

lebih besar pada sumber-sumber penerimaan eksternal di luar pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen sumber pendapatan asli daerah dibandingkan daerah induk. Hal ini bisa dilihat dari porsi pendapatan asli daerah terhadap transfer pusat dan provinsi serta pinjaman. Pemerintah daerah pemekaran perlu meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan meningkatkan kapasitas fiskal. Dengan peningkatan kapasitas fiskal maka akan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Tingkat Kemampuan Pembiayaan

Tingkat kemampuan pembiayaan daerah induk dan daerah pemekaran tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan yaitu 7,10% dan 7,11%. Hasil ini menunjukkan bahwa baik di daerah induk maupun daerah pemekaran pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah masih sangat tergantung pada sumber lain diluar pendapatan asli daerah. Rendahnya tingkat kemampuan pembiayaan juga menunjukkan bahwa porsi pengeluaran rutin merupakan porsi terbesar dibandingkan dengan porsi pengeluaran pembangunannya.

Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal antara daerah induk dengan daerah menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Rata-rata rasio belanja modal daerah induk adalah 26,54% sedangkan rasio belanja modal daerah pemekaran adalah 32,36%. Hasil ini sesuai dengan penelitian Rappenas yang menyatakan bahwa rasio belanja modal daerah pemekaran lebih besar daripada daerah induk. Rasio belanja modal daerah pemekaran lebih besar dibandingkan daerah induk karena daerah pemekaran merupakan daerah relatif baru, sehingga perlu banyak menambah belanja investasi aset tetap sebagai sarana dan prasarana bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Rasio belanja modal yang lebih rendah daripada rasio

belanja rutin menunjukkan bahwa pemerintah daerah selama ini hanya fokus pada belanja rutin sehingga kurang berfokus kepada rakyat. Hal ini bisa dilihat bahwa porsi belanja terbesar adalah pada belanja rutin, bukan pada belanja modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dibahas di atas, maka dalam bagian ini akan disajikan kesimpulan atas hasil penelitian dan saran.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil uji statistik tingkat desentralisasi fiskal menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat desentralisasi daerah induk dan daerah pemekaran. Tingkat desentralisasi daerah induk maupun daerah pemekaran masih pada level yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa baik di daerah induk maupun daerah pemekaran PAD bukan merupakan porsi yang dominan dalam total pendapatan daerah. Pendapatan daerah masih tergantung pada sumber lain di luar sumber asli daerah itu sendiri.
2. Berdasarkan hasil uji statistik tingkat kemandirian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat kemandirian daerah induk dan daerah pemekaran. Tingkat kemandirian daerah induk dan daerah pemekaran masih berada pada taraf yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ini bisa dilihat pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersifat instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dilihat dari besarnya transfer pemerintah pusat.
3. Berdasarkan hasil uji statistik tingkat kemampuan pembiayaan menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara daerah induk



dan daerah pemekaran. Hasil ini menunjukkan bahwa belanja rutin merupakan proporsi belanja yang paling besar dalam pengeluaran daerah. Rasio kemampuan pembiayaan yang rendah menunjukkan bahwa dalam membiayai pengeluaran rutinnya daerah induk dan daerah pemekaran masih sangat tergantung pada dana dari sumber di luar PAD.

4. Berdasarkan hasil uji statistik rasio belanja modal menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara daerah induk dan daerah pemekaran. Daerah pemekaran merupakan daerah yang relatif baru sehingga belum mempunyai aset tetap sebanyak daerah induk, sehingga daerah pemekaran mengalokasikan belanja modal lebih besar dibandingkan daerah induk. Porsi belanja modal masih lebih kecil dibandingkan belanja rutin, hasil ini menunjukkan bahwa belanja rutin merupakan proporsi belanja yang paling besar dalam pengeluaran daerah.

Saran

1. Dilihat dari rata-rata tingkat desentralisasi, tingkat kemandirian, dan tingkat kemampuan pembiayaan daerah induk dan daerah pemekaran yang masih ada di tingkat yang rendah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah induk dan daerah pemekaran belum memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD tanpa mengakibatkan ekonomi hiya tinggi atau menghambat lalu lintas barang.
2. Rasio belanja modal yang lebih rendah dibandingkan belanja rutin mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk pembangunan masih rendah, pemerintah daerah harus mengalokasikan porsi belanja modal yang lebih besar utamanya untuk sarana masyarakat, sehingga pembangunan lebih bisa dirasakan oleh masyarakat.
3. Penelitian sejenis perlu dilakukan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian,

dengan sampel yang diperbanyak, dan rasi keuangan yang lebih komprehensif dan runtut waktu yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonisrama, 2009, *Evaluasi Pemekaran & Banyuwangi*, www.sribd.com
- Argama, Rizki, 2005, *Pejabatistikan Otonom Daerah dan Fenomena Pemekaran Wilayah di Indonesia*, Makalah, Jakarta Fakultas Hukum UI
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2008 *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah 2001-2005*.
- Elmi, B, 2002, *Kebijakan desentralisasi fiskal kaitannya dengan hutang luar negeri pemerintah daerah otonom*, kaji ekonomi dan keuangan, vol. 6, nomo 4.
- Firmansyah, Tatas, 2007, *Analisis Kemandirian Kabupaten di Jawa Barat*, Skripsi Fakultas Ekonomi, UII
- Halim, Abdul, 2008, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat
- Halim, A. dan Mujib, I. 2009, *Problematika desentralisasi dan perimbangan keuangan pemerintahan pusat daerah: Peluang dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya daerah* Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta
- Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPI, STIM YKPN, 2007.
- Mailendra, Fitra, 2009, *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah dan Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia di Jawa Barat*, Departemen Ilmu Ekonomi, IPB Bogor
- Pemekaran Daerah di Indonesia, www.wikipedia.org diunduh tanggal 14-08-2009
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang struktur format APBD

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, 2005. *Efektivitas Pemekaran Wilayah di Era Otonomi Daerah*. Balitbang, Depdagri.